

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH (SIMDA) DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA MATARAM

Ade Lestari

lade692@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Baiq Anggun Hilendri Lestari

hilendria@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Lalu Takdir Jumaidi

takdirjumaidi@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan retribusi sebelum dan setelah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) serta kendala maupun solusi dari Badan Keuangan Daerah Kota Mataram terhadap pengelolaan retribusi daerah menggunakan SIMDA. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya SIMDA Keuangan pengerjaan pengelolaan keuangan daerah mulai dari pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan dikerjakan secara otomatis dengan menggunakan sistem sehingga tentunya cukup baik karena memiliki ketepatan waktu, andal dan relevan.

Kata Kunci: Retribusi Daerah, SIMDA

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the management of retribution before and after using the Regional Financial Management Information System (SIMDA) as well as the constraints and solutions of the Mataram City Regional Finance Agency for the management of regional retribution using SIMDA. This research is a research with a qualitative approach. The data collection procedures carried out were observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that with the SIMDA Finance, local financial management, starting from classification, summarizing until finally forming financial reports, is carried out automatically using a system so that it is certainly quite good because it is timely, reliable and relevant.

Keywords: Retribution, SIMDA.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat merupakan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi dikembangkannya suatu sistem informasi berbasis komputer. Perkembangan teknologi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah (Gunadi, 2017). Laporan keuangan pemerintah daerah saat ini diwajibkan untuk mengikuti standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yang peraturan pemerintah ini menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan disempurnakan melalui Peraturan dalam Negeri No.64 tahun 2013 yang mengatur secara teknis pembuahan laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan basis akrual (Wibisono, 2017). Terdapat tujuan utama diterapkannya hal tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan sehingga dapat mencerminkan

sisi transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia khususnya pada Kota Mataram. Salah satu bentuk kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah adalah dengan melakukan pemanfaatan teknologi menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah SIMDA.

SIMDA Keuangan telah ditetapkan oleh berbagai pemerintah provinsi di Indonesia. Sampai dengan bulan September 2015, program aplikasi SIMDA telah diimplementasikan pada 425 Pemda dari 542 Pemda yang ada atau sebanyak 78,41%. SIMDA Keuangan merupakan aplikasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan sebagai pengelolaan keuangan secara terintegrasi meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan. SIMDA Keuangan sebagai sarana optimalisasi pajak/retribusi (Kewas et al., 2019). Bahwa diketahui masih terdapat beberapa kelemahan SIMDA. Dewi & Mariska (2018), OPD menerapkan SIMDA juga terdapat beberapa kekurangan belum ada dokumentasi mengenai bagan arus ringkasan (summary flow chart) yang memperlihatkan aliran/ arus kas data, lemahnya data management system, prosedur untuk melihat dan secara incidental masih terlalu lama, serta tata ruang perkantoran masih kurang memadai, seringnya human error, aplikasi SIMDA Keuangan expired dan seringnya jaringan offline.

Kewas et al (2019), masih terdapat beberapa permasalahan penggunaan SIMDA seperti masalah proses input data pendapatan daerah yang terhambat prosesnya akibat harus menunggu terlebih dahulu rekonsiliasi kas. Sistem yang kurang terintegrasi sehingga mengakibatkan kesalahan setor yang informasinya tidak bisa disimpan dengan baik oleh sistem. Alfian (2016), tidak digunakannya SIMDA oleh karyawan OPD dalam penyusunan laporan keuangan pada pos-pos tertentu dikarenakan keterbatasan kemampuan terhadap sumber daya manusia sehingga ditemukan pegawai OPD yang lebih memilih menggunakan kertas kerja manual atau dengan Microsoft Excel untuk menyelesaikan pekerjaan yang dirasa lebih mudah daripada menggunakan SIMDA. Merujuk pada uraian diatas penerapan aplikasi SIMDA pada OPD di Indonesia masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian Kembali terkait penggunaan SIMDA dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mana pada penelitian ini mengkhususkan pada retribusi daerah. Penelitian terkait retribusi daerah menggunakan SIMDA masih sedikit di Indonesia, penelitian dilakukan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui pengelolaan retribusi daerah sebelum menggunakan SIMDA, untuk mengetahui pengelolaan retribusi daerah setelah menggunakan SIMDA, untuk mengetahui kendala BKD Kota Mataram dalam pengelolaan retribusi daerah menggunakan SIMDA, untuk mengetahui cara BKD Kota Mataram dalam mengatasi kendala pengelolaan retribusi daerah menggunakan SIMDA.

TINJAUAN LITERATUR

Sistem Informasi Manajemen Daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Pihak legislative dapat menggunakan untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah (Gunadi, 2017).

Mais & Yuniara (2020) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapatkan pretasi kembalinya secara langsung. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan menurut (Rahantoknam et al., 2017) Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Laporan keuangan sektor publik untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas suatu entitas dalam mengelola sumber daya (Pamungkas, 2012). Menurut Windhu (2018) retribusi daerah dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- 3) Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan serta kegiatan pemanfaatan ruang tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan dengan amanat PP No.71 tahun 2010 bahwa setiap pemerintah daerah wajib dalam memanfaatkan teknologi informasi berbasis akrual dalam pengelolaan transaksi keuangan daerah mulai dari penyusunan sampai terbitnya laporan keuangan pemerintah daerah oleh karena itu BPKP (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan) merancang SIMDA Keuangan untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara terintegrasi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan (Peraturan Pemerintah No 71 Tahun, 2010). Retribusi daerah akan merupakan bagian dari laporan keuangan sektor publik. Output yang dihasilkan dari SIMDA adalah penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan (BPKPP.go.id, 2021).

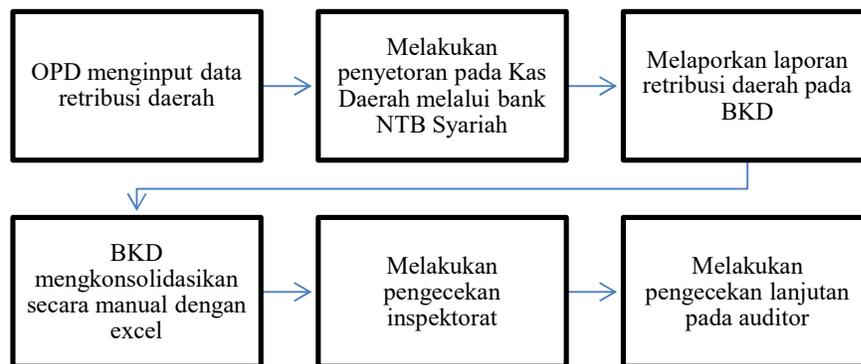
METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan tujuan utama dari kualitatif adalah untuk menjabarkan temuan dan fenomena, menyajikan apa adanya sesuai dengan fakta atau temuan di lapangan (Tobing et al., 2017). Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama pengamatan/observasi dilakukan pada penelitian ini untuk mengamati bagaimana proses pengelolaan retribusi daerah dengan menggunakan SIMDA, yang kedua wawancara yang dilakukan langsung pada staff sub bidang akuntansi dan pelaporan BKD Kota Mataram dan yang terakhir studi dokumentasi dengan melakukan

pengumpulan data melalui sumber-sumber yang tertulis terkait dengan pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIMDA pada retribusi daerah. Proses analisis data yang dilakukan (Sugiyono, 2012) mengemukakan 4 tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian, yaitu: Reduksi data (*data reduction*), Paparan data (*data display*), Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Selain ini untuk keabsahan data digunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang di dapat dari informan yang satu dengan informan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

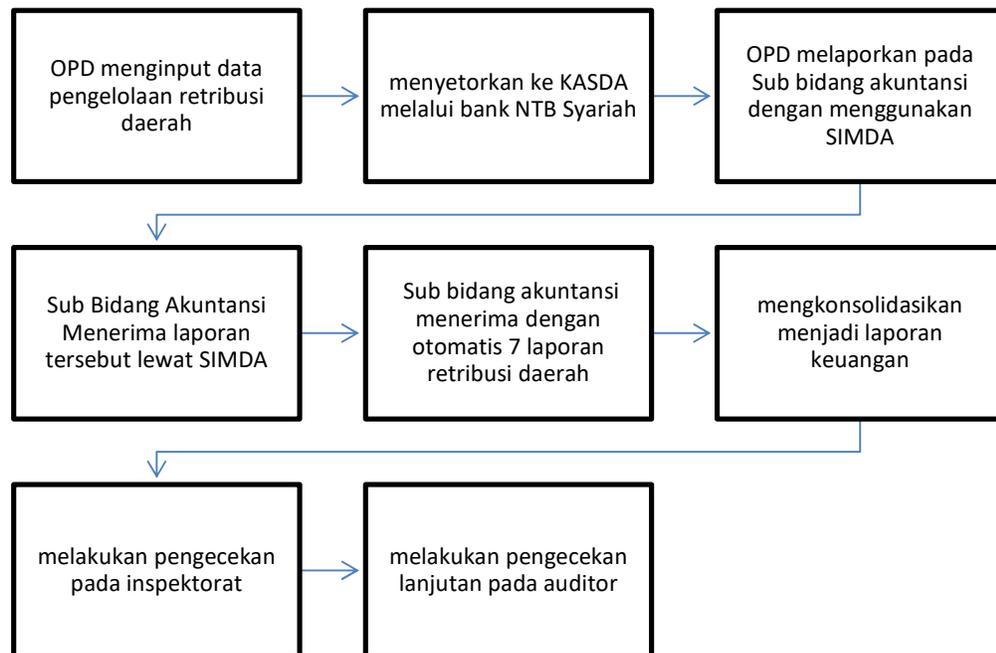
Pengelolaan retribusi daerah sebelum menggunakan SIMDA



Gambar 1. Pengelolaan Retribusi Daerah Sebelum Menggunakan SIMDA

Proses sebelum menggunakan SIMDA di mulai dari OPD melakukan pengelolaan data terkait retribusi daerah, kemudian melakukan penyetoran dana retribusi daerah pada kas daerah melalui bank NTB Syariah. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi melalui rekening koran kas daerah sebagai alat kontrol, tujuan dari rekonsiliasi adalah untuk mencocokkan apakah terdapat kesalahan setor oleh pihak OPD. Sebelum diterapkannya SIMDA Keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya pada retribusi daerah, BKD Kota Mataram melakukan konsolidasi pengelolaan retribusi daerah menggunakan Microsoft Excell.

Pengelolaan Retribusi Daerah Setelah Menggunakan SIMDA



Gambar 2. Pengelolaan Retribusi Daerah Setelah Menggunakan SIMDA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan adalah Tahapan awal dalam proses pengelolaan retribusi daerah menggunakan SIMDA adalah Tahapan awal dalam proses pengelolaan retribusi daerah menggunakan SIMDA adalah OPD menginput data pengelolaan retribusi daerah menggunakan SIMDA. Setelah di input maka OPD akan langsung melakukan penyetoran dana retribusi daerah pada KASDA (Kas Daerah) melalui bank NTB Syariah setiap harinya. Setelah dilakukannya penyetoran maka OPD akan melakukan pelaporan pada sub bidang akuntansi dengan menggunakan SIMDA terkait dengan retribusi daerah. Sub bidang akuntansi dan pelaporan pada BKD akan menerima laporan tersebut melalui SIMDA secara otomatis sebanyak 10 laporan diantaranya tanda bukti penerimaan, STS, Buku Rekapitulasi Penerimaan, Buku Pembantu Per Rincian Penerimaan, SPJ Pendapatan, Buku Kas Penerimaan, Register STS, Register Tanda Bukti Penerimaan, Register Ketetapan Pendapatan, Buku Pendapatan Harian.

Perbedaan kualitas pengelolaan retribusi daerah sebelum dan setelah menggunakan SIMDA oleh Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Tabel 1. Tabel Kualitas Pengelolaan Retribusi Daerah

Kualitas	Microsoft excel	SIMDA
Efisiensi waktu	Membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam melakukan penyajian laporan keuangan sehingga sering kali terjadi keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan khususnya pada laporan retribusi daerah	Memiliki ketepatan waktu dalam melakukan penyajian laporan keuangan khususnya pada laporan retribusi daerah karena dengan menggunakan SIMDA semua terjadi dengan otomatis
Ketepatan	Laporan retribusi daerah disusun dengan cara yang manual	Menerima data retribusi daerah dari OPD sehingga terotomatisasi dalam pembuatan laporan retribusi.
Ketelitian	Kerap kali terjadi kesalahan rumus-rumus dalam pengelolaan retribusi daerah karena menggunakan excel. Dan kesalahan demikian membutuhkan waktu cukup lama dalam menanganinya.	Kesalahan dalam pengelolaan retribusi daerah dapat diminimalisir karena tidak perlu menginput rumus dalam melakukan konsolidasi laporan.
Tingkat Efektifitas	Tingkat dapat melakukan pengecekan data retribusi daerah secara <i>up to date</i> karena bersifat <i>offline</i>	Bagi sub bidang akuntansi dan pelaporan dapat melakukan pemeriksaan data retribusi daerah kapan saja dan dimana saja karena data yang sudah di input dapat tersimpan secara otomatisasi

Sumber: Data primer diperoleh BKD Kota Mataram, 2021

Kendala BKD Kota Mataram Dalam Pengelolaan Retribusi Daerah Menggunakan SIMDA

Segala bentuk permasalahan yang terjadi karena SIMDA, maka BKD Kota Mataram selalau berkoordinasi dengan BPKP NTB. Contoh masalah yang terjadi misalnya jika terjadi kesalahan input data sementara pihak BKD tidak memiliki wewenang dalam melakukan perubahan maka akan dilakukan perbaikan langsung kepada pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan, contoh lain misalnya di APBD terdapat akun baru namun di SIMDA belum di input akun baru tersebut sehingga pihak BKD perlu melakukan pelaporan pada admin.

Solusi BKD Kota Mataram Mengatasi Kendala Dalam Pengelolaan Retribusi Daerah Menggunakan SIMDA

Dalam melakukan input data keuangan pada SIMDA harus dilakukan secara hati-hati karena data keuangan yang sudah di input tidak bisa dilakukan perubahan kembali oleh OPD. Kesalahan-kesalahan input yang terjadi dari pihak BKD Kota Mataram dapat menghubungi admin untuk berkonsultasi dengan pihak BPKP dan BPKP yang akan langsung merevisi atau memperbaiki langsung kesalahan input tersebut namun hal ini membutuhkan waktu.

Terkadang terdapat akun-akun baru yang ada di SIMDA dari pihak APBD sehingga kerap kali BKD Kota Mataram tidak bisa melakukan pernjurnalan seperti biasa, oleh karena solusi akan hal tersebut adalah BKD kota Mataram harus melaporkan permasalahan atau mengkonfirmasi hal ini pada BPKP jika sudah maka pihak BPKP akan menginput pada SIMDA tersebut. Dan hal ini bersifat sangat penting sehingga harus dengan segera diselesaikan oleh BKD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam proses pengelolaan retribusi daerah mulai dari proses pengklasifikasian, pengikhtisaran hingga akhirnya terbentuk laporan keuangan pemerintah Kota Mataram yang dikerjakan secara otomatis dengan menggunakan sistem. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Natsir, 2017) dengan adanya SIMDA maka kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan cukup baik, antara lain memiliki ketepatan waktu, andal dan relevan.

REFERENSI

- Alfian, M. (2016). Faktor Pendukung Implemetasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(3), 119. <https://doi.org/10.24914/jeb.v18i3.277>
- BPKP.go.id. (2021). *Pengenalan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA)*. [www.Bpkp.Go.Id. http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp](http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi-2.1.bpkp)
- Dewi, N. C., & Mariska, S. (2018). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintahan Kota Pariaman. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 1–8.
- Gunadi, E. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gowa). In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Kewas, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2019). Analisis Kendala Pengimplementasian Pendapatan pada SIMDA Keuangan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 10(2), 108. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.25598>
- Mais, R. G., & Yuniara, W. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dki Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA),* 1177, 1–10.
- Natsir, I. (2017). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. *Skripsi.*
- Pamungkas, B. (2012). Jurnal Ilmiah Ranggagading Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading,* 12(1), 1–11.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun, 1 (2010). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rahantoknam, T. A., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi,* 12(2), 754–761. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18058.2017>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.*
- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., & Susilawati, L. K. P. A. (2017). *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif.* Universitas Udayana.
- Wibisono, A. F. (2017). Efektifitas Peran BPKP dalam Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan,* 7(1), 951. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i1.09>
- Windhu, P. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah.* Rajawali Pers.